



BADAN
PANGAN
NASIONAL

NATIONAL
FOOD
AGENCY

2025

LAPORAN JUNI

DEPUTI BIDANG KERAWANAN
PANGAN DAN GIZI



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah swt. atas berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Bulanan Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi periode bulan Juni Tahun 2025 dapat terselesaikan dengan baik.

Laporan bulanan disusun untuk memberikan gambaran capaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan dan pertanggung jawaban penggunaan anggaran sebagaimana amanat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Selain itu, Laporan Bulanan merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional dan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional.

Laporan Bulanan ini berisi tentang laporan realisasi pencapaian output fisik dan realisasi penyerapan anggaran setiap akhir periode bulan berjalan dan disusun sebagai laporan kinerja lingkup Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi. Kami berharap laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan menjadi referensi untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan berikutnya.

Jakarta, Juli 2025
Plt. Deputi Bidang Kerawanan Pangan
dan Gizi,

Dr. Drs. Sarwo Edhy, S.P., M.M., M.H.
NIP. 196203221983031001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	2
1.3. Metodologi Penyusunan Laporan	2
BAB II RENCANA KINERJA OUTPUT	3
2.1. Rencana Kinerja	3
BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN	5
3.1. Realisasi Fisik dan Keuangan	5
BAB IV PENUTUP	28
4.1. Kesimpulan	28
4.2. Permasalahan	28
4.3. Langkah Perbaikan (Rekomendasi)	29



DAFTAR TABEL

Tabel 1.Target Fisik dan Keuangan Periode Bulan Juni 2025 sesuai DIPA Revisi	3
Tabel 2.Realisasi Fisik dan Keuangan Periode Bulan Juni 2025 Per Output dan Komponen Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi.....	5



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Pertemuan dengan Tim Litbang Kompas dan IFRI.....	8
Gambar 2.Koordinasi dengan Bappeda Jawa Barat dan DKPP Jawa Barat....	10
Gambar 3. FGD Pembahasan Hasil Sementara Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan /Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) Nasional 2025	11
Gambar 4.FGD Pembahasan Hasil Kajian Kesiapsiagaan Krisis Pangan Tahun 2025	13
Gambar 5.Pertemuan Koordinasi Rencana Kolaborasi dalam Kegiatan Bantuan Pangan Terfortifikasi Tahun 2025	14
Gambar 6.Ground Check Analisis Kerawanan Pangan berdasarkan Karakteristik Sosial Ekonomi Rumah Tangga dan Kewilayahan serta Audiensi Kegiatan Intervensi Pengendalian Kerawanan Pangan di Kabupaten Bantul, Provinsi D.I.Yogyakarta	18
Gambar 7.NFA Ajak Siswa Berperan Aktif Mencegah Terjadinya Pemborosan Pangan.....	21
Gambar 8. NFA Apresiasi Peran Aktif Mahasiswa Atasi Kerawanan Pangan..	22
Gambar 9. Kolaborasi NFA Bersama Mitra Internasional Perkuat Penyelamatan Pangan.....	24
Gambar 10. Antisipasi Potensi Kerawanan Pangan, NFA Terus Perkuat Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan	26
Gambar 11. NFA Perkuat Kebijakan Melalui Finalisasi Direktori Angka PoU Kecamatan dan Desa	27



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 49), Deputi Bidang Kerawanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerawanan pangan dan gizi. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Direktorat Kewaspadaan Pangan menyelenggarakan fungsi: a. Koordinasi dan perumusan kebijakan di bidang kerawanan pangan dan gizi ; b. Pengendalian Kerawanan Pangan c. Pengadaan dan Pengelolaan dan penyaluran bantuan pangan untuk masyarakat berpendapatan rendah dan terdampak bencana d. Pengawasan dan pemenuhan persyaratan gizi pangan; e. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kerawanan pangan dan gizi e. Pemantauan, analisis, evaluasi, pelaporan di bidang kerawanan pangan dan gizi; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala. Selain itu, pelaksanaan tugas dan fungsi kerawanan gizi yang dilaksanakan oleh Deputi Bidang Kerawanan Pangan Badan Pangan Nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional, dialihkan menjadi tugas dan fungsi Badan Gizi Nasional Berdasarkan Pasal 55 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional.

Hasil dari pemantauan dan evaluasi serta bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran selama bulan Juni Tahun 2025 dituangkan dalam bentuk laporan pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan di Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi posisi periode bulan Juni Tahun 2025. Laporan ini merupakan catatan rekaman realisasi fisik dan keuangan selama periode bulan Juni Tahun 2025 serta hasil evaluasi menuju perbaikan kualitas pelaksanaan kegiatan yang berkelanjutan. Ruang lingkup laporan ini mencakup keseluruhan output lingkup Deputi Bidang Kerawanan



Pangan dan Gizi baik fisik maupun keuangan. Melalui laporan ini diharapkan dapat memberi informasi tentang hasil pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan dan Direktorat Kewaspadaan Pangan di tahun berjalan. Laporan ini sekaligus menjadi bahan masukan bagi peningkatan kinerja Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi pada periode pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang.

1.2. Tujuan

1. Mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan melalui realisasi fisik dan keuangan lingkup Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi pada periode bulan Juni Tahun 2025.
2. Melakukan pemantauan terhadap realisasi fisik dan keuangan, berdasarkan target pada periode bulan Juni Tahun 2025

1.3. Metodologi Penyusunan Laporan

1. Mengumpulkan data dan informasi target dan capaian fisik dan keuangan.
2. Menganalisis data target fisik dan keuangan berdasarkan lembar ke-III DIPA dengan data realisasi fisik dan keuangan berdasarkan aplikasi SAKTI.
3. Menyajikan hasil analisis dalam laporan.



BAB II RENCANA KINERJA OUTPUT

2.1. Rencana Kinerja

Rencana kinerja output merupakan pencapaian dari sasaran strategis dan indikator kinerja Badan Pangan Nasional selama tahun 2025. Rencana kinerja output pada periode bulan Juni Tahun 2025 akan dilihat dari dukungan pencapaian output/RO dan komponen sebagaimana target sesuai lembar III DIPA Revisi pada bulan Juni Tahun 2025. Pada dokumen tersebut pada bulan Juni ditargetkan sebesar 7.50%. Target tersebut sebagaimana tersaji pada tabel 1 berikut:

Tabel 1. Target Fisik dan Keuangan Periode Bulan Juni 2025 sesuai DIPA Revisi Badan Pangan Nasional

Program/Kegiatan/KRO/RO/Komponen			Alokasi Tahun 2025		Target Bulan Juni Tahun 2025	
Program, Kegiatan dan KRO	RO/Output	Komponen	Anggaran Rp.14.536.538.000	Fisik	Keuangan (7.50%) Rp. 1.090.240.350	Fisik
HA-Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas						
6876 Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pematapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi						
AEA - Koordinasi	Koordinasi, Monev dan Pelaporan Pengendalian Kerawanan Pangan	Koordinasi, Monev dan Pelaporan Pengendalian Kerawanan Pangan	1.114.864.000	1 Kegiatan	83.614.800	0
AFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	NSPK Pengendalian Kerawanan Pangan	Penyusunan NSPK Pengendalian Kerawanan Pangan	179.647.000	4 NPSK	13.473.525	0
PBR-Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Kerawanan Pangan	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Kerawanan Pangan	476.337.000	1 rekomendasi kebijakan	35.725.275	0
QEC-Bantuan Produk	Bantuan Pangan dalam rangka Pengendalian kerawanan pangan	Penyaluran Bantuan Pangan dalam rangka pengendalian kerawanan pangan	4.655.627.000	64.800 paket	349.172.025	0



Program/Kegiatan/KRO/RO/Komponen			Alokasi Tahun 2025		Target Bulan Juni Tahun 2025	
Program, Kegiatan dan KRO	RO/Output	Komponen	Anggaran Rp.14.536.538.000	Fisik	Keuangan (7.50%) Rp. 1.090.240.350	Fisik
QEC-Bantuan Produk	Bantuan Pangan terfortifikasi dan Biofortifikasi	Penyaluran Bantuan Pangan terfortifikasi	583.200.000	1.944 paket	43.740.000	0
QMA-Data dan Informasi Publik	Data dan Informasi Pengendalian Kerawanan Pangan	Data dan Informasi Pengendalian Kerawanan Pangan	402.770.000	1 Data	30.207.750	0
AEA-Koordinasi	Koordinasi mendukung Penyelamatan Pangan	Koordinasi mendukung Penyelamatan Pangan	1.559.056.000	1 Kegiatan	116.929.200	0
PBR-Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan Pangan	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan Pangan	914.282.000	5 rekomendasi kebijakan	68.571.150	0
QMA – Data dan Informasi Publik	Data dan Informasi Penyelamatan pangan	Data dan Informasi Penyelamatan pangan	1.004.850.000	1 Data	75.363.750	0
QMA-Data dan Informasi Publik	Data dan Informasi Kewaspadaan Pangan	Data dan Informasi Kewaspadaan Pangan	257.900.000	1 Data	19.342.500	0
RAG- Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Sarana prasarana upaya penyelamatan pangan	Fasilitasi sarana prasarana upaya penyelamatan pangan	3.388.005.000	5 unit	254.100.375	0



BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1. Realisasi Fisik dan Keuangan

Sesuai dengan DIPA Induk Badan Pangan Nasional Tahun 2025, Anggaran Deputi Bidang Kerawanan Pangan terdapat di masing-masing eselon 2 yaitu Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan akan melaksanakan 5 (lima) KRO yang terdiri dari 6 output/RO dengan pagu anggaran sebesar Rp. 7.412.445.000,- dan Direktorat Kewaspadaan Pangan memiliki 5 output/RO dengan pagu anggaran pusat sebesar Rp. 7,124,093,000,- dan untuk mendukung capaian kinerja kegiatan Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi. Realisasi keuangan pada periode bulan Juni 2025 diperoleh dari aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Kementerian Keuangan. Realisasi fisik dan keuangan per output.

Tabel 2. Realisasi Fisik dan Keuangan Periode Bulan Juni 2025 Per Output dan Komponen Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi.

Program/Kegiatan/KRO/RO/Komponen			TARGET (7.50%)		REALISASI	
Program, Kegiatan dan KRO	RO/Output	Komponen	Keuangan Rp.1.090.240.350	Fisik	Keuangan Rp. 265.987.075	Fisik
6876 Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi						
AEA - Koordinasi	Koordinasi, Monev dan Pelaporan Pengendalian Kerawanan Pangan	Koordinasi, Monev dan Pelaporan Pengendalian Kerawanan Pangan	83.614.800	1 kegiatan	27.068.550	0
AFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	NSPK Pengendalian Kerawanan Pangan	Penyusunan NSPK Pengendalian Kerawanan Pangan	13.473.525	3 NSPK	17.139.439	0
PBR-Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Kerawanan Pangan	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Kerawanan Pangan	35.725.275	1 rekomendasi kebijakan	20.487.315	0
QEC-Bantuan Produk	Bantuan Pangan dalam rangka Pengendalian kerawanan pangan	Penyaluran Bantuan Pangan dalam rangka pengendalian kerawanan pangan	349.172.025	64.800 paket	29.914.100	0



Program/Kegiatan/KRO/RO/Komponen			TARGET (7.50%)		REALISASI	
Program, Kegiatan dan KRO	RO/Output	Komponen	Keuangan Rp.1.090.240.350	Fisik	Keuangan Rp. 265.987.075	Fisik
QEC-Bantuan Produk	Bantuan Pangan terfortifikasi dan Biofortifikasi	Penyaluran Bantuan Pangan terfortifikasi	43.740.000	1.944 paket	0	0
QMA-Data dan Informasi Publik	Data dan Informasi Pengendalian Kerawanan Pangan	Data dan Informasi Pengendalian Kerawanan Pangan	30.207.750	1 Data	69.078.003	0
AEA-Koordinasi	Koordinasi mendukung Penyelamatan Pangan	Koordinasi mendukung Penyelamatan Pangan	116.929.200	0	45.527.948	0
PBR-Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan Pangan	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan Pangan	68.571.150	1	22.128.500	0
QMA – Data dan Informasi Publik	Data dan Informasi Penyelamatan pangan	Data dan Informasi Penyelamatan pangan	75.363.750	0	34.643.220	0
QMA-Data dan Informasi Publik	Data dan Informasi Kewaspadaan Pangan	Data dan Informasi Kewaspadaan Pangan	19.342.500	0	0	0
RAG- Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Sarana prasarana upaya penyelamatan pangan	Fasilitasi sarana prasarana upaya penyelamatan pangan	254.100.375	0	0	0

Berdasarkan realisasi fisik dan keuangan periode bulan Juni 2025, anggaran Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi yang telah terserap tercatat sebesar Rp. 265.987.075 atau 1.83 % dari total alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 14.536.538.000,00.

Apabila dibandingkan dengan target realisasi periode bulan Juni 2025 sebesar Rp.1.090.240.350,00 atau 7.50%, maka persentase capaian realisasi terhadap target tersebut adalah 24.40%.



Realisasi ini didukung oleh kegiatan dari dua direktorat, yaitu: 1). Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan sebesar Rp.163.687.407 2). Direktorat Kewaspadaan Pangan sebesar Rp.102.299.668. Sehingga total realisasi periode bulan Juni 2025 mencapai Rp.265.987.075.

Selama periode tersebut, kegiatan yang telah dilaksanakan mencakup koordinasi program, pengumpulan data lapangan, penyusunan laporan pemantauan, serta kegiatan pendukung lainnya yang sesuai dengan rencana kerja Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi.

3.1.1. Kegiatan Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan

Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan melaksanakan 6 output yaitu: 1) Koordinasi Monev dan Pelaporan Pengendalian Kerawanan Pangan; 2) NSPK Pengendalian Kerawanan Pangan; 3) Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Kerawanan Pangan; 4) Bantuan Pangan dalam rangka Pengendalian kerawanan pangan(Bantuan Pangan untuk Masyarakat Terdampak Bencana dan Aksi Kesiapsiagaan Krisis Pangan) ; 5) Bantuan Pangan terfortifikasi dan Biofortifikasi 6) Data dan Informasi Pengendalian Kerawanan Pangan. dengan alokasi anggaran pusat sebesar Rp. 7.412.445.000 (Tujuh Milyar Empat Ratus Dua Belas Juta Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah).

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan periode bulan Juni 2025:

1. Sharing Session Pengukuran Indeks yang dilaksanakan oleh Litbang Kompas

Pertemuan dilaksanakan pada hari Rabu, 18 Juni 2025, bertempat di Gedung Kompas Gramedia Jakarta, bertujuan untuk melakukan studi banding terhadap Indeks Ketahanan Pangan dan metode pengukuran yang telah dihasilkan oleh NFA. Pertemuan dibuka oleh Wakil General Manager Litbang Kompas (B.E Satrio), dan dihadiri oleh Peneliti Senior Litbang Kompas (Reza Felix Citra), Tim Litbang Kompas, Tim IFRI (*Indonesia Fertilizer Research Institute*) dengan narasumber Direktur Pengendalian Kerawanan Pangan NFA.

Wakil General Manager Kompas menyampaikan bahwa Litbang Kompas bersama IFRI sedang dalam proses menyempurnakan penghitungan Indeks Pertanian Berkelanjutan yang telah dilakukan di tahun 2024. Litbang Kompas



juga mengapresiasi terhadap Indeks Ketahanan Pangan (IKP) yang telah disusun oleh NFA yang mampu memotret situasi ketahanan pangan secara komprehensif dengan melibatkan berbagai stakeholder pangan menggunakan metodologi dan indikator yang dapat merepresentasikan situasi ketahanan pangan dari sisi wilayah suatu wilayah.

Direktur Pengendalian Kerawanan Pangan menyampaikan secara umum: (1) urgensi penghitungan IKP dan penyusunan FSVA; (2) IKP dan FSVA sebagai Indikator Kinerja Pembangunan Pangan Nasional (RPJMN) 2025-2029 dan Daerah (RPJMD) 2025-2029; (3) metode penghitungan IKP dan penyusunan FSVA 2018-2024 serta proses pemutakhiran metodologi; (4) metodologi penghitungan IKP dan penyusunan FSVA 2025; serta (5) justifikasi dan penjelasan umum dari setiap indikator penyusun (regulasi, standar nasional/global).

Tim Litbang Kompas dan IFRI dalam sesi diskusi mendalami (1) representasi pakar dan stakeholder yang terlibat dalam penyusunan metodologi dan penetapan indikator dan bobot, (2) mekanisme pengumpulan dan jenis data yang digunakan, (3) sumber data yang digunakan, (4) metodologi pengolahan data hingga indikator komposit, (5) strategi komunikasi hasil analisis kepada seluruh stakeholder pusat dan daerah, (6) regulasi terkait atau yang mendukung penghitungan IKP dan penyusunan FSVA, (7) mekanisme validasi hasil analisis dan pihak yang dilibatkan, serta (9) pemanfaatan indeks yang telah dihasilkan maupun tindak lanjut apabila terdapat resistensi dari suatu daerah yang termasuk rentan rawan pangan.



Gambar 1. Pertemuan dengan Tim Litbang Kompas dan IFRI



2. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pangan Provinsi Jawa Barat.

Pertemuan koordinasi dilaksanakan pada hari Selasa, 24 Juni 2025 di Ruang Rapat Nusantara II, bertujuan untuk melakukan koordinasi perencanaan pembangunan pangan Provinsi Jawa Barat terkait perencanaan ketahanan pangan, stabilisasi harga dan pasokan, serta keamanan dan mutu pangan. Pertemuan dibuka oleh Direktur Pengendalian Kerawanan Pangan, dihadiri Bappeda Jawa Barat, DKPP Jawa Barat, Biro dan Perwakilan eselon 2 Lingkup NFA (Biro PKH, Pusdatin, Dit. SPHP, Dit. Pengendalian Kerawanan Pangan, Dit. Penganekaragaman Konsumsi Pangan, Dit. Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan).

DKPP dan Bappeda menyampaikan maksud dan tujuan melakukan koordinasi, yaitu untuk menggali informasi terkait indikator kinerja pembangunan pangan sebagai masukan terhadap dokumen RPJMD Provinsi Jawa Barat. Arah kebijakan pembangunan pangan Provinsi Jawa Barat tahun 2025-2029 antara lain: (1) penguatan sistem pangan berkelanjutan; dan (2) pengelolaan susut dan sisa pangan.

Direktur Pengendalian Kerawanan Pangan menjelaskan: (1) Pemetaan isu pangan dan pertanian dalam RPJMN 2025-2029; (2) Indikator kinerja ketahanan pangan berdasarkan RPJMN 2025-2029; (3) Indikator kinerja pembangunan pangan daerah; (4) Metodologi penyusunan FSVA dan IKP; (5) Dasar hukum pemilihan dari setiap indikator dalam penyusunan FSVA; (6) Dukungan pemerintah daerah dalam penyusunan FSVA; dan (7) Strategi untuk mewujudkan ketahanan pangan.

Pokok yang didiskusikan dalam pertemuan antara lain:

- Pembahasan indikator kinerja pembangunan daerah dengan mengacu pada Perpres 12 Tahun 2025 dan Inmendagri 2 Tahun 2025;
- Pemanfaatan IKP dan PoU sebagai indikator kinerja daerah;
- Justifikasi pemilihan indikator dalam penyusunan FSVA;
- Indikator, program, dan kegiatan terkait pengawasan keamanan pangan segar asal tumbuhan;



- Indikator yang menggambarkan stabilitas pasokan dan harga pangan, serta intervensi yang dilakukan; dan
- Update penyusunan rencana strategis Badan Pangan Nasional.



Gambar 2. Koordinasi dengan Bappeda Jawa Barat dan DKPP Jawa Barat

3. FGD Pembahasan Hasil Sementara Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan /Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) Nasional 2025

FGD dilaksanakan pada Selasa, 17 Juni 2025 di Hotel Santika Depok, bertujuan untuk memperoleh masukan atas hasil sementara FSVA Nasional dan IKP 2025.

1. Pertemuan dibuka oleh Direktur Pengendalian Kerawanan Pangan serta dihadiri oleh tim pakar (Prof. Dr. Ir. Achmad Suryana, MS. (Aliansi Peneliti Pertanian Indonesia), Prof. Dr. Ir. Drajat Martianto, M.Si., (IPB), Prof. dr. Endang L. Achadi, MPH, Dr.PH (UI), Dr. Farit M. Afendi (IPB), Ir. Mewa Ariani, M.S., (BRIN), World Food Programme, Karo Manajemen Kinerja, Data dan Informasi Kemenko Bidang Pangan dan Tim Penyusun FSVA Lintas K/L (Bappenas, Kemendagri, Kemenkes, Kementan, Kemensos, BPS, BIG, dan Direktorat lingkup NFA).

Direktur PKP menegaskan secara umum: (1) urgensi FSVA Nasional dan IKP 2025; (2) FSVA dan IKP sebagai Indikator Kinerja Pembangunan Pangan Nasional (RPJMN) dan Daerah (RPJMD); (3) proses pemutakhiran metodologi; (4) metodologi penyusunan FSVA Nasional dan penghitungan IKP 2025 2025; dan (5) hasil sementara FSVA dan IKP 2025.

Hasil sementara FSVA Nasional dan IKP 2025 dengan metodologi baru (12 indikator) sebagai berikut:

- Persentase daerah rentan rawan pangan sebesar 15,76%. Target usulan NFA sebesar 16,73% sementara yang telah tercantum dalam RPJMN



adalah 11,5%;

- Daerah rentan rawan pangan terbanyak tersebar di Provinsi NTT (22,2%), Maluku (11,1%), Papua (9,9%), dan Papua Pegunungan (9,9%);
- Faktor penyebab daerah rentan rawan pangan antara lain keamanan pangan, rasio konsumsi normatif per kapita terhadap ketersediaan pangan (NCPR), skor PPH Konsumsi, prevalensi balita stunting, Prevalence of Undernourishment (PoU), dan persentase penduduk miskin; dan IKP Nasional sebesar 73,12 sementara target sebesar 73,2.

Kesepakatan Forum atas Hasil Sementara FSVA & IKP 2025:

- Data yang belum final disepakati, yaitu produksi sagu menggunakan ATAP 2023, data stunting untuk 102 kabupaten/kota yang belum tersedia dalam SSGI 2024 menggunakan data SKI 2023, data CBPD pada 79 kabupaten/kota akan divalidasi Direktorat DCP NFA, dan data ketersediaan energi menggunakan data BPS.
- Atas hasil FSVA dan IKP 2025, Bappenas akan melakukan memutakhirkan target penurunan persentase daerah rentan rawan pangan RPJMN 2023-2029 melalui RKP.
- Publikasi FSVA dan IKP 2025 ditambahkan satu bab khusus tentang justifikasi pemutakhiran metodologi, kelebihan metodologi baru dalam menggambarkan situasi ketahanan pangan secara komprehensif, dan backcasting perhitungan tiga tahun terakhir.

Setelah pertemuan Direktorat PKP akan memfinalkan penghitungan IKP dan penyusunan FSVA menggunakan data yang telah disepakati forum serta menyusun bahan publikasi FSVA dan IKP 2025.



Gambar 3. FGD Pembahasan Hasil Sementara Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan /Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) Nasional 2025



4. FGD Pembahasan Hasil Kajian Kesiapsiagaan Krisis Pangan Tahun 2025

FGD dilaksanakan pada 19 Juni 2025 di IPB International Convention Center (IICC) Bogor, berujuan untuk: (1) Menyampaikan hasil kajian kesiapsiagaan krisis pangan Kabupaten Lebak dan pandeglang; dan (2) Memperoleh masukan hasil kajian.

Pertemuan dibuka oleh Direktur Pengendalian Kerawanan Pangan, dengan narasumber Danang Pramudita, SP.MSi. dan Bahroin Tampubolon, SE., MSI. (IPB University), serta dihadiri oleh Perwakilan Dinas Ketahanan Pangan Prov. Banten, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang, Kepala Bidang Distribusi dan Sumberdaya Pangan Kabupaten Lebak, dan Tim pokja mitigasi Direktorat PKP.

Direktur PKP menyampaikan kegiatan yang ada di Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan, khususnya aksi kesiapsiagaan krisis pangan dalam mendukung kebijakan Badan Pangan Nasional, yaitu mengentaskan daerah rawan pangan dan menyelenggarakan bantuan pangan sebagai wujud kontribusi pemenuhan target RPJMN 2025-2029.

Hasil kajian kesiapsiagaan krisis pangan Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak menunjukkan bahwa berdasarkan penilaian risiko kesiapsiagaan krisis pangan di kedua kabupaten secara akumulasi menghasilkan nilai risiko rendah namun kondisi kesiapsiagaan krisis pangan mengalami peningkatan (rendah ke sedang) ketika digabungkan nilainya dengan hasil analisis kerawanan pangan (FSVA) dan data IRBI.

Diskusi selama pertemuan menghasilkan:

- a. Nilai terbobot menunjukkan kedua kabupaten memiliki kategori sedang (prioritas 2), sehingga dibutuhkan tindakan untuk mengurangi risiko terjadinya krisis pangan. Oleh karena itu, kegiatan aksi kesiapsiagaan krisis pangan dilaksanakan di Kabupaten Lebak dan Pandeglang.
- b. Kegiatan Aksi Kesiapsiagaan Krisis Pangan tidak hanya sebagai intervensi bantuan pangan, tetapi juga diintegrasikan dengan kegiatan edukasi kepada masyarakat dan aparat pemerintahan setempat tentang langkah-langkah kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi krisis pangan.

- c. Sasaran diprioritaskan kepada KK Desil 1 pada kecamatan dengan desa rentan rawan pangan terbanyak yang sering terjadi bencana dan banyak masyarakat yang terdampak.



Gambar 4.FGD Pembahasan Hasil Kajian Kesiapsiagaan Krisis Pangan Tahun 2025

5. Pertemuan Koordinasi Rencana Kolaborasi dalam Kegiatan Bantuan Pangan Terfortifikasi Tahun 2025

Pertemuan dilaksanakan secara daring pada Rabu, 25 Juni 2025, bertujuan untuk menyelaraskan rencana kolaborasi dalam kegiatan bantuan pangan terfortifikasi tahun 2025 antara Bapanas, GAIN, PP Kagama, dan Dompot Dhuafa (DD). Pertemuan dibuka dan dipimpin oleh Direktur Pengendalian Kerawanan Pangan, serta dihadiri oleh perwakilan GAIN, PP Kagama (Direktorat Pengabdian Masyarakat), DD, dan tim pokja mitigasi Direktorat PKP.

Direktur Pengendalian Kerawanan Pangan menyampaikan terkait: a) jadwal kegiatan; b) konsep kegiatan; c) capaian yang diharapkan; dan d) peluang kolaborasi yang dapat dilakukan oleh mitra pembangunan, yaitu GAIN, PP Kagama, dan DD.

Berdasarkan agregasi jumlah KRS di desa yang terdapat di Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor lokus sasaran Kegiatan Bantuan Pangan Terfortifikasi Tahun 2025 di Desa Gunung Sari, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. Penyaluran direncanakan pada bulan Agustus-Oktober oleh Bapanas dan dilanjutkan pada bulan November-Januari 2026 oleh GAIN. Kepastian penyaluran menunggu data BNBA yang bersumber dari DTSEN yang Peraturan Menteri tentang Bagi Pakai sedang dalam tahap harmonisasi.

Kesepakatan hasil pertemuan, yaitu berupa dukungan yang akan dilakukan oleh mitra pembangunan, yaitu:

1. GAIN berkontribusi dalam:



- a) melanjutkan pemberian bantuan beras fortifikasi 3 bulan setelah penyaluran dari Bapanas;
 - b) studi untuk mengetahui pengaruh konsumsi beras fortifikasi bantuan terhadap peningkatan gizi mikro menggunakan pengujian biomarker sebanyak 3 kali dengan sasaran Wanita Usia Subur (WUS), yaitu sebelum serta setelah 3 bulan dan 6 bulan menerima bantuan; dan
 - c) pemberian obat cacing sebelum diberikan bantuan untuk mengetahui keberadaan gangguan penyerapan gizi dalam tubuh calon penerima bantuan.
 - d) menyiapkan bahan edukasi pangan B2SA hasil diskusi dengan D31 dalam bentuk buku saku.
2. PP Kagama dan DD akan berkontribusi dalam:
- a) edukasi intensif pola hidup dan makan yang sehat kepada seluruh masyarakat di wilayah Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor;
 - b) pendampingan masyarakat penerima bantuan beras fortifikasi agar mengolah dan mengonsumsi beras fortifikasi dengan benar, sehingga intervensi yang dilakukan efektif;
 - c) pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor dengan mengoptimalkan potensi sumberdaya lokal, termasuk bahan pangan lokal untuk meningkatkan pemenuhan gizi;
 - d) pemberian intervensi asupan pangan bergizi kepada masyarakat di luar desa lokus intervensi bantuan pangan beras fortifikasi Bapanas & GAIN.



Gambar 5. Pertemuan Koordinasi Rencana Kolaborasi dalam Kegiatan Bantuan Pangan Terfortifikasi Tahun 2025



6. Ground Check Analisis Kerawanan Pangan berdasarkan Karakteristik Sosial Ekonomi Rumah Tangga dan Kewilayahan serta Audiensi Kegiatan Intervensi Pengendalian Kerawanan Pangan di Kabupaten Bantul, Provinsi D.I.Yogyakarta

Ground Check dilaksanakan pada tanggal 24-26 Juni 2025, bertujuan untuk: (1) Mengkonfirmasi kondisi di lapangan dengan hasil analisis kerawanan pangan berdasarkan karakteristik sosial ekonomi rumah tangga dengan kondisi riil di lapangan dan (2) Pre Sosialisasi Kegiatan Intervensi Pengendalian Kerawanan Pangan Tahun 2025 dan penyampaian materi FSVA 2025.

Pemaparan hasil analisis Kerawanan Pangan tingkat provinsi dan kabupaten/kota oleh Tim Direktorat PKP. Bantul dipilih sebagai lokasi ground check karena Bantul memiliki angka persentase PoU kabupaten/kota tergolong tinggi dan jumlah penduduk PoU yang besar di Provinsi DIY, sehingga menjadi salah satu pertimbangan menjadi lokus penerima bantuan kegiatan IPKP 2025. Tim Direktorat PKP bersama BPS didampingi tim DPKP DIY menyampaikan hasil analisis kerawanan pangan ke DPKP Bantul, bahwa terdapat 3 indikator dominan yang mempengaruhi kerawanan pangan di Bantul, yaitu 1) kemiskinan; 2) keberadaan RT tinggal di dalam dan sekitar hutan; dan 3) keberadaan RT Lansia. Berdasarkan hasil analisis kerawanan pangan di Bantul diperoleh hasil bahwa: RT miskin 4 kali lebih berisiko mengalami rawan pangan dibandingkan dengan RT yang tidak miskin, RT yang tinggal pada wilayah di dalam/sekitar hutan 2 kali lebih berisiko rawan pangan dari yang tinggal di wilayah luar Kawasan hutan, RT yang ada lansia 2 kali lebih berisiko mengalami rawan pangan dibandingkan dengan yang tidak ada lansia.

DPKP Provinsi DIY dan DPKP Kabupaten Bantul menjelaskan bahwa kelompok masyarakat miskin di Kabupaten Bantul umumnya bermata pencaharian di bidang pertanian dan kaitannya dengan kerawanan pangan banyak di antaranya masih belum memperhatikan porsi, frekuensi dan komposisi asupan makanan yang dikonsumsi sehari-hari, sementara itu kelompok lansia di Bantul umumnya mengonsumsi makanan dengan porsi yang lebih sedikit dibanding penduduk usia muda hal tersebut diduga menjadi penyebab RT dengan keberadaan Lansia PoU nya tinggi.



Ground check hasil analisis Kerawanan Pangan di tingkat desa/kelurahan dilakukan di 2 Kalurahan, yakni Poncosari dan Bangunjiwo. Adapun pertimbangan kedua Kalurahan tersebut dipilih berdasarkan rekomendasi DPKP Bantul di mana Kalurahan Poncosari merupakan Kalurahan dengan jumlah masyarakat miskin tertinggi di Bantul, sementara Bangunjiwo dipilih karena merupakan Kalurahan dengan jumlah keberadaan RT lansia tinggi di Bantul.

Kalurahan Poncosarimemiliki KK sebanyak 4225 KK dan 25 persen di antaranya tergolong miskin. Kondisi kemiskinan yang terjadi sebagian besar dialami oleh masyarakat dengan mata pencaharian bidang pertanian, adapun potensi kerawanan pangan yang terjadi pada kelompok miskin disebabkan pemenuhan asupan makanan tidak menjadi prioritas utama, tetapi mereka lebih mengedepankan gaya hidup memanfaatkan pinjol. KK miskin telah mendapatkan berbagai bantuan dari pemerintah (BPNT, PKH, dana desa), namun pola tersebut lama-kelamaan justru menciptakan budaya ketergantungan warga terhadap bantuan, sehingga kondisinya tetap miskin.

Kalurahan Bangunjiwo memiliki jumlah Lansia sebanyak 1.700 jiwa dan tergolong tinggi di antara desa lain di Bantul. Letak Bangunjiwo yang berbatasan langsung dengan Kota Yogya, menyebabkan masyarakat usia muda pergi /pindah merantau kerja ke luar kota, sehingga banyak ditemukan Lansia tunggal. Lansia di Kelurahan Bangunjiwo mendapatkan bantuan makanan siap saji melalui kegiatan Boga Sehat Dinsos, yaitu pemberian makanan siap saji sebanyak 2 kali/hari namun dapat jadi makanan tersebut tidak dikonsumsi oleh penerima bantuan, sehingga PoU tercatat tinggi. Selain itu pada umumnya lansia mengonsumsi makanan dengan porsi dan frekuensi yang lebih sedikit dibandingkan masyarakat usia muda. Hal tersebut menyebabkan RT lansia memiliki PoU besar.

Kesimpulan hasil analisis kerawanan pangan Kabupaten Bantul dikonfirmasi oleh kedua Lurah telah sesuai dengan kondisi yang ada di wilayah masing-masing. Tim DPKP Provinsi DIY dan Bantul mengapresiasi kegiatan analisis kerawanan pangan ini dan dapat menjadi referensi ke depan untuk kegiatan yang bersifat intervensi menggunakan APBD.

Selain Ground Cheek dilaksanakan pula audiensi kegiatan Intervensi Pengendalian Kerawanan Pangan (IPKP) dan penyampaian materi penyusunan



FSVA 2025. Direktur PKP menyampaikan gambaran kegiatan IPKP 2025 kepada tim DPKP DIY dan DPKP Bantul. Lokus kegiatan IPKP Tahun 2025 terdiri dari 5 Kabupaten (4 Kabupaten di Jateng dan 1 Kabupaten di DIY), Kabupaten Bantul menjadi salah satu lokus penerima bantuan IPKP Tahun 2025 dan merupakan lokus baru sepanjang kegiatan IPKP bergulir sejak tahun 2023, oleh karena itu dirasa perlu untuk dilakukan pre sosialisasi IPKP 2025 dengan Dinas Pangan Provinsi dan Kabupaten.

Direktur PKP meminta dukungan dari Provinsi dan Kabupaten Bantul agar kegiatan IPKP berjalan lancar di Bantul baik dalam hal persiapan, penyaluran bantuan, hingga pemenuhan dokumen pertanggungjawaban. Saat ini masih menunggu ditandatanganinya Permen bagi pakai DTSEN sebagai sumber data BNBA calon penerima bantuan. Setelah itu baru data calon penerima bantuan diserahkan secara berjenjang untuk dilakukan verval. Lebih lanjut teknis lebih detail akan dituangkan dalam juknis dan akan ada sosialisasi kegiatan yang mengundang perwakilan dari masing-masing kabupaten lokus penerima bantuan.

Direktur PKP menyampaikan materi penyusunan FSVA 2025 khususnya dalam hal: metode baru penyusunan FSVA 2025 dan perubahan indikator penyusunan FSVA Tahun 2025 baik pada aspek ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan. Dir 2.1 berpesan agar hasil FSVA disampaikan kepada dinas OPD lain, peta ini harus dapat dimanfaatkan secara luas lintas sektor, sehingga berdampak pada penurunan kerawanan pangan di masing-masing daerah.

DPKP Provinsi DIY dan DPKP Bantul siap mendukung pelaksanaan IPKP 2025 tentunya sebagai lokus baru penerima bantuan akan berkoordinasi lebih intensif dengan tim di pusat. Sementara itu terkait kegiatan FSVA, DPKP Provinsi DIY belum terinformasi adanya anggaran dekonsentrasi FSVA di Provinsi, dan secepatnya akan berkoordinasi dengan Tim FSVA di pusat.



Gambar 6. Ground Check Analisis Kerawanan Pangan berdasarkan Karakteristik Sosial Ekonomi Rumah Tangga dan Kewilayahan serta Audiensi Kegiatan Intervensi Pengendalian Kerawanan Pangan di Kabupaten Bantul, Provinsi D.I. Yogyakarta

3.1.2. Kegiatan Direktorat Kewaspadaan Pangan

Direktorat Kewaspadaan Pangan melaksanakan 6 output yaitu: 1) Koordinasi Mendukung Penyelamatan Pangan; 2) RPerpres Kebijakan dan Strategi Nasional Penyelamatan Susut dan Sisa Pangan (SSP); 3) Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan Pangan; 4) Data dan Informasi Penyelamatan Pangan; 5) Data dan Informasi Kewaspadaan Pangan dan 6) Sarana Prasarana Upaya Penyelamatan Pangan. Alokasi anggaran pusat yaitu sebesar Rp. 7.124.093.000. (Tujuh Milyar Seratus Dua Puluh Empat Juta Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah).

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan periode bulan Juni 2025:

1. NFA Ajak Siswa Berperan Aktif Mencegah Terjadinya Pemborosan Pangan

CIREBON - Stop Boros Pangan terus digaungkan oleh Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) sebagai upaya pencegahan sisa pangan/food waste serta merubah perilaku masyarakat khususnya generasi muda, untuk menumbuhkan perilaku menghargai makanan dengan tidak menyia-nyaiakan pangan.

“Sampah makanan saat ini menjadi tantangan yang nyata, FAO juga menyebutkan secara global 1,3 milyar ton makanan terbuang setiap tahunnya dan itu setara dengan 1/3 makanan yang diproduksi untuk konsumsi dunia.” papar Direktur Kewaspadaan Pangan NFA, Nita Yulianis saat menjadi keynote



speech “Pelatihan Pahlawan Pangan/Food Defender Kota Cirebon” di Kota Cirebon, Kamis (12/6/2025).

“Indonesia menjadi salah satu negara dengan jumlah sampah makanan yang cukup tinggi, berdasarkan kajian Sisa dan Susut Pangan (SSP) Bappenas timbulan sampah makanan mencapai 23 hingga 48 juta ton per tahun.” lanjutnya.

Nita Yulianis memaparkan bahwa timbulan SSP berasal dari 5 tahap rantai pasok yaitu tahapan produksi, pasca panen dan penyimpanan, proses dan pengemasan, distribusi dan pemasaran, serta konsumsi. “Tahapan konsumsi merupakan titik kritis nya karena sampah makanan terbesar ada pada tahap ini, sekitar 5-19 juta ton/tahun yang apabila bisa diselamatkan dapat memberi makan 62-125 juta orang” tutur nya.

Sampah makanan tidak hanya mengakibatkan kerugian pada sektor ekonomi namun juga berpengaruh terhadap lingkungan.

“Perlu untuk diketahui juga ternyata sisa makanan yang terbuang itu bisa menjadi boomerang tersendiri bagi lingkungan kita, karena akan menghasilkan gas metana yang menyebabkan efek rumah kaca. Sehingga berkontribusi terjadinya perubahan iklim yang menyebabkan bumi akan semakin panas.” Tegas Nita Yulianis.

“Jadi mulai saat ini Stop Boros Pangan harus dijadikan budaya dan itu dimulai semenjak dini, peran adik-adik sangat penting dalam mendorong dan menumbuhkan kesadaran perilaku stop boros pangan untuk mencegah sisa pangan. Apalagi sebagai penerima Makan Bergizi Gratis, tolong dihabiskan ya makanannya jangan sampai ada yang terbuang” tandas Nita.

Nita Yulianis mengajak para siswa yang hadir untuk bisa mengambil peran sebagai agen perubahan didalam upaya penyelamatan pangan. “Kami berharap adik-adik semua mensosialisasikan Stop Boros Pangan ini ke lingkungannya dimulai dari diri sendiri. Mari mulai dari langkah kecil, ambil makanan secukupnya, habiskan tanpa sisa, karena makanan bukan untuk disia-siakan.” ungkapnya.

Menutup paparannya Direktur Kewaspadaan Pangan NFA, Nita Yulianis memberikan apresiasi kepada Kota Cirebon dalam menindaklanjuti upaya menggiatkan Stop Boros Pangan melalui terbitnya SE Walikota tentang Gerakan



Selamatkan Pangan, salahsatunya melalui inisiasi Pahlawan Pangan/Food Defender kepada siswa siswi SMP.

Sementara itu Kepala NFA Arief Prasetyo Adi di berbagai kesempatan sering mengajak para masyarakat untuk tidak membuang-buang makanan. “Mari kita membiasakan untuk tidak membuang-buang makanan yang ada di meja makan, kosongkan piring dan habiskan makanan yang ada,” ajaknya.

“Makanan bukan hanya soal nutrisi, namun merupakan kerja keras petani dan nelayan. Setiap butir nasi yang terbuang artinya kita menyia-nyiakan sumber daya alam, tenaga kerja, dan biaya produksi yang besar. Kita perlu mengubahnya, khususnya di kalangan generasi muda sebagai agen perubahan masa depan,” sambung Arief.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Cirebon, Elmi Masruroh saat membuka acara menyebutkan pelatihan ini untuk mendukung upaya penyelamatan pangan serta meningkatkan kesadaran dan peran generasi muda sebagai agen perubahan (agent of change) pada penguatan ketahanan pangan keluarga dan masyarakat.

“Ketahanan pangan merupakan hal yang sangat penting, tetapi masih banyak perilaku pemborosan pangan yang dilakukan. Kegiatan ini bertujuan untuk menanamkan perilaku serta pemikiran sejak dini kepada anak usia sekolah bahwa makanan harus dihabiskan sehingga tidak mubazir.” Ucap Elmi Masruroh

“Setelah ini diharapkan adik-adik semua diharapkan dapat menularkan ilmu dari pelatihan yang nanti diberikan kepada teman-temannya bahwa makanan itu harus dihabiskan” lanjut Elmi.

Kegiatan yang dilaksanakan di Kantor Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kota Cirebon ini dihadiri oleh pejabat lingkup DKP3 Kota Cirebon, beberapa perwakilan sekolah lingkup Kota Cirebon yang telah menerima program MBG seperti SMP 1, SMP 4, SMP Veteran, SMP Telekomunikasi Sekar Kemuning, serta Kepala perwakilan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kota Cirebon



Gambar 7. NFA Ajak Siswa Berperan Aktif Mencegah Terjadinya Pemborosan Pangan

2. NFA Apresiasi Peran Aktif Mahasiswa atasi Kerawanan Pangan

Peran aktif pemuda, khususnya mahasiswa dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan nasional terkait isu kerawanan pangan sangatlah strategis. Mahasiswa merupakan agen perubahan dalam upaya memajukan ketahanan pangan nasional.

Salah satu wujud nyata dari kontribusi tersebut dapat terlihat dalam "Kegiatan Perlombaan Komunikasi Epicentrum Universitas Padjajaran" sebagai salah satu rangkaian "Ideation 2025" yang mengangkat tema, "Together We Thrive: Empowering Marginalized Community Against Food Insecurity".

Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Kewaspadaan Pangan Badan Pangan Nasional/National Food Agency, Nita Yulianis saat menjadi juri kegiatan tersebut di Kampus Universitas Padjajaran di Jatinangor-Sumedang, Selasa (3/6/2025).

"Ideation 2025 adalah salah satu contoh kongkrit inisiatif dan keikutsertaan aktif generasi muda didalam upaya menderaskan ide-ide komunikasi yang disertai inovasi dalam penanganan terkait isu kerawanan pangan. Langkah ini dapat menjadi inspirasi bagi mahasiswa di seluruh Indonesia, bahwa bidang keilmuan komunikasi juga bisa berkontribusi mengangkat isu dan solusi kerawanan pangan yang menjadi kekhawatiran banyak negara di belahan dunia lain." Papar Nita.



“Tadi saya melihat adik-adik mahasiswa menyajikan beberapa konsep tentang penanggulangan kerawanan pangan, salah satunya seperti redistribusi pangan berlebih yang tadi dipaparkan, itu sejalan dengan apa yang telah dilakukan oleh Badan Pangan Nasional. Memang potensi pangan terbuang sangat besar sekitar 23 hingga 48 juta ton/tahun dan itu bisa memberi makan 125 juta orang,” lanjutnya.

Mengantisipasi terjadinya kerawanan pangan, Badan Pangan Nasional juga memiliki Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi (SKPG) yang memotret situasi bulanan kewaspadaan pangan wilayah dan peranan daerah sangat dominan di dalam merespon hasil SKPG untukantisipasi potensi terjadinya kerawanan pangan.

Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi diberbagai kesempatan selalu menekankan isu kerawanan pangan memerlukan kolaborasi pentahelix dengan melibatkan berbagai unsur.

“Pentingnya keterlibatan aktif akademisi, bisnis, masyarakat, pemerintah dan media secara sinergis dan berkelanjutan merupakan kunci dalam mengatasi permasalahan kerawanan pangan. Khusus untuk akademisi, kolaborasi dengan kampus merupakan bagian penting dalam membangun ekosistem pangan nasional yang terintegrasi” tegas Arief.



Gambar 8. NFA Apresiasi Peran Aktif Mahasiswa Atasi Kerawanan Pangan



3. Kolaborasi NFA Bersama Mitra Internasional Perkuat Penyelamatan Pangan

Sebagai komitmen dalam mengurangi sampah makanan, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) terus menggencarkan upaya untuk mencegah dan mengurangi Susut dan Sisa Pangan (SSP) menuju target pengurangan hingga 75% di tahun 2045.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menjalin kolaborasi dengan mitra kerja internasional, salah satunya bersama dengan Pemerintah Denmark dengan melakukan kerja sama Strategic Sector Cooperation on Food loss and Waste.

“Upaya penanganan susut dan sisa pangan membutuhkan keterlibatan multi stakeholder yaitu ABCGM (Academician, Bussiness, Comunity, Government dan Media) serta keterlibatan mitra kerja internasional” ungkap Direktur Kewaspadaan Pangan NFA, Nita Yulianis di Jakarta, Senin (16/6/2025).

“Penguatan kerangka regulasi, sinkronisasi kebijakan, kolaborasi dan penyadaran stakeholder pada isu SSP merupakan misi yang akan diusung melalui kerjasama dengan Denmark” lanjut Nita Yulianis.

Salah satu bentuk kerja sama yaitu diselenggarakannya Workshop The Strategic Sector Cooperation on Food loss and Waste (SSCFLW) pada tanggal 16-17 Juni 2025 lalu di Jakarta.

Workshop ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas SDM dalam memetakan kebutuhan regulasi, sinkronisasi kebijakan serta melakukan kolaborasi dengan stakeholder lain kaitannya dengan SSP.

Direktur Kewaspadaan Pangan, Nita Yulianis menyampaikan bahwa Badan Pangan Nasional sedang menyiapkan regulasi tentang pengaturan penyelamatan pangan. "Selain menyiapkan regulasi untuk penyelamatan pangan, kami telah meluncurkan beberapa pedoman yang dapat dirujuk oleh seluruh stakeholder dalam melakukan aksi penyelamatan pangan" ujar Nita.

Nita menambahkan telah banyak dilakukan berbagai aksi penyelamatan pangan baik di pusat, provinsi dan kabupaten/kota melalui penderaasan informasi, sosialisasi, kampanye dan edukasi.



Selain itu, Badan Pangan Nasional juga telah mengembangkan platform aplikasi stop boros pangan yaitu sbp.badanpangan.go.id. Platform ini digunakan seluruh stakeholder untuk melaporkan dan mengumpulkan data pangan yang diselamatkan dan disalurkan kepada penerima manfaat.

Lotte Dam, Food and Agriculture Sector Counsellor Kedutaan Besar Denmark di Jakarta menyampaikan bahwa berharap dalam Workshop ini dapat dilakukan berbagi pengetahuan bersama dengan pakar sehingga dapat diciptakan kolaborasi yang baik antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Denmark.



Gambar 9. Kolaborasi NFA Bersama Mitra Internasional Perkuat Penyelamatan Pangan

4. Potensi Kerawanan Pangan, NFA Terus Perkuat Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan

Dalam upaya memperkuat ketahanan pangan nasional dan merespons potensi kerawanan pangan di berbagai daerah, Badan Pangan Nasional (National Food Agency/NFA) terus mendorong pengembangan Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi (SKPG).

“Peta SKPG berbasis web dapat diakses melalui skpg.badanpangan.go.id dan telah digunakan untuk melakukan monitoring situasi kewaspadaan pangan wilayah, serta digunakan daerah sebagai dasar untuk melaksanakan intervensi” papar Direktur Kewaspadaan Pangan Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) saat membuka diskusi kajian komprehensif untuk memperkuat Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi di Bogor, Rabu (25/6/2025).

“Pengembangan SKPG secara dinamis terus diupayakan untuk memperkirakan situasi kewaspadaan pangan secara tepat waktu maupun sasaran, terutama di



wilayah yang rentan rawan pangan. Sehingga dapat dilakukan intervensi sesuai permasalahan dan penyebab terjadinya rawan pangan” ungkap Nita lebih lanjut.

Hal tersebut sesuai arahan Kepala NFA Arief Prasetyo Adi yang pada berbagai kesempatan selalu menekankan bahwa sistem peringatan dini ini merupakan upaya strategis untuk mendeteksi secara cepat dan akurat berbagai indikator yang mengarah pada potensi kerawanan pangan, seperti gangguan produksi, distribusi, hingga dampak perubahan iklim.

“Dengan sistem ini, kita bisa lebih sigap dalam mengambil langkah-langkah pencegahan dan respons kebijakan yang cepat dan tepat sasaran, baik di tingkat pusat maupun daerah,” ujar Arief.

Sesuai Komitmen Indonesia dalam Nation For Growth (N4G) Summit 2025 di Paris pada Maret lalu, salah satu komitmen tsb adalah penguatan SKPG. Sehingga perlu memastikan bahwa wawasan peringatan dini secara efektif memandu distribusi pangan, alokasi sumber daya, dan respon kebijakan di provinsi yang rentan terhadap iklim dan rawan pangan, ujar Nita.

Guru Besar IPB University, Drajat Martianto menyampaikan analisis SKPG yang telah berbasis web, dapat digunakan untuk monitoring situasi kewaspadaan pangan. “SKPG kedepannya diharapkan mampu bertransformasi menjadi platform yang lebih dinamis karenanya perlu ditentukan indikator yang bersifat prediktif” ucapnya.

Indikator prediktif yang sangat berpengaruh terhadap akses pangan adalah harga pangan. Hasil analisis terhadap pemilihan komoditas sensitif yg berpengaruh terhadap masyarakat yaitu: beras, minyak goreng dan telur yang mewakili kebutuhan energi dan protein” sambungnya.

Sementara itu, Guru Besar Universitas Ibn Khaldun, Achmad Suryana yang juga hadir pada diskusi tersebut menegaskan pentingnya SKPG menyajikan informasi agar dapat digunakan sebagai peringatan dini serta membangun kesiapsiagaan sehingga mampu merespons masalah kerawanan pangan yang dapat diprediksi dengan cepat, terfokus, dan tepat waktu. Turut hadir pada diskusi tersebut dosen statistika IPB University, Farit Mochamad Afendi, Direktur Teknis GAIN, Aang Sutrisna serta perwakilan dari Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat Badan Pusat Statistik (BPS).



Gambar 10. Antisipasi Potensi Kerawanan Pangan, NFA Terus Perkuat Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan

5. NFA Perkuat Kebijakan Melalui Finalisasi Direktori Angka PoU Kecamatan dan Desa

Sebagai langkah penting dalam penguatan kebijakan penanganan kerawanan pangan, Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) susun direktori angka Prevalence of Undernourishment (PoU).

Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Kewaspadaan Pangan NFA, Nita Yulianis saat membuka diskusi reviu dan finalisasi penyusunan direktori angka PoU Kecamatan dan Desa Tahun 2024 di Depok, Jum'at 20/6/2025.

"Penyusunan direktori ini telah mencapai 80%, sehingga perlu direviu dan difinalkan bersama dengan BPS untuk memastikan akurasi isi serta visualisasinya sehingga mudah dipahami. Reviu ini akan menghasilkan 38 buku direktori PoU tingkat kecamatan dan desa serta akan dirilis pada Juli 2025 mendatang," ungkap Nita Yulianis.

Direktur Kewaspadaan Pangan NFA, Nita Yulianis juga memaparkan bahwa untuk melihat kondisi kerawanan pangan dan gizi dapat ditunjukkan melalui angka Prevalence of Undernourishment (PoU). "PoU Indonesia tahun 2024 sebesar 8,27%, mengalami perbaikan dari tahun 2023 sebesar 8,53%." tegasnya.

Kegiatan kewaspadaan pangan di tingkat pusat dan daerah dilaksanakan melalui tiga kegiatan prioritas yakni penyusunan Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi (SKPG) secara periodik oleh pemerintah pusat dan daerah sebagai salah satu alat/tools early warning system dalam menetapkan dasar kebijakan pangan dan gizi.



“Selanjutnya adalah upaya penyelamatan pangan melalui Gerakan Selamatkan Pangan (GSP) untuk mencegah dan mengurangi sisa pangan bersama pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah khususnya 17 provinsi pelaksana dekonsentrasi GSP serta stakeholder lainnya,” jelas Nita

Direktur Statistik Kesejahteraan Rakyat BPS, Ahmad Avenzora menyampaikan apresiasinya atas kolaborasi dalam penyusunan direktori PoU 2024 hingga ke tingkat kecamatan dan desa.

“Ini merupakan keterbaruan yang penting, sebelumnya hanya sampai kabupaten/kota. Untuk PoU 2025 akan kita upayakan disusun lebih awal, kami berharap data PoU dapat segera rilis dan dimanfaatkan secara optimal,” sambut Ahmad Avenzora.

Direktur Statistik Kesejahteraan Rakyat BPS menyebutkan bahwa sejak 2018, angka PoU Indonesia sudah dapat diperbandingkan dengan negara lain karena memiliki metode yang terstandarisasi secara global.

Dengan finalisasi ini, diharapkan Buku Direktori Angka PoU Kecamatan dan Desa Tahun 2024 ini dapat menjadi landasan kebijakan pangan yang kuat dan tepat sasaran dalam mendorong penurunan angka kerawanan pangan di seluruh Indonesia.



Gambar 11. NFA Perkuat Kebijakan Melalui Finalisasi Direktori Angka PoU Kecamatan dan Desa



BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan Deputi Bidang Kerawanan Pangan periode Juni 2025 sebagai berikut:

1. Terdapat 1(satu) kegiatan terdiri dari 5 KRO dan 6 output/RO berdasarkan DIPA Induk Badan Pangan Nasional Tahun 2025 dengan alokasi anggaran sebesar Rp.14.536.538.000 untuk mendukung capaian kinerja Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas.
2. Alokasi Anggaran sebesar Rp.14.536.538.000 dengan target penyerapan periode bulan juni sebesar Rp.1.090.240.350 (7.50%). Realisasi keuangan periode bulan juni tercatat sebesar **Rp. 265.987.075** atau setara dengan 1.83% dari total pagu tahunan, dan 24.40% terhadap target periode bulan juni. Realisasi ini bersumber dari dua direktorat, yaitu: Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan sebesar **Rp. 163.687.407** Direktorat Kewaspadaan Pangan sebesar **Rp. 102.299.668**.
3. Secara keseluruhan, pelaksanaan kegiatan telah mencakup koordinasi program, pengumpulan data lapangan, penyusunan laporan pemantauan, serta kegiatan pendukung lainnya sesuai rencana kerja. walaupun belum mencapai 100% dari target bulanan yaitu Rp.1.090.240.350 atau 7.50%.

4.2. Permasalahan

Beberapa permasalahan yang menjadi kendala pada periode bulan Juni 2025 sebagai berikut :

1. **Belum tercapainya target realisasi anggaran pada bulan Juni 2025**
Realisasi anggaran pada periode bulan Juni belum sepenuhnya mencapai target penyerapan yang telah ditetapkan. Dari target sebesar Rp1.090.240.350 atau 7,50% dari total pagu anggaran, realisasi yang tercatat baru mencapai Rp. 265.987.075 atau sebesar 24.40% dari target bulanan. Sehingga diperlukan upaya percepatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan guna mendukung pencapaian target realisasi anggaran tahunan secara optimal.



2. **Potensi keterlambatan pencapaian target tahunan** Jika laju serapan anggaran tidak segera ditingkatkan, maka ada risiko tidak tercapainya target tahunan, yang dapat berdampak pada efektivitas program dan evaluasi kinerja unit kerja.

4.3. Langkah Perbaikan (Rekomendasi)

1. **Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Prioritas** Mendorong percepatan realisasi kegiatan di masing-masing direktorat untuk memastikan kegiatan yang belum berjalan segera dilaksanakan sesuai waktu yang ditetapkan.
2. **Monitoring dan Evaluasi Berkala** Melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara rutin terhadap progres kegiatan dan anggaran, baik di tingkat pusat maupun unit pelaksana teknis, serta melaporkannya dalam forum internal secara periodik.